



Judul : DPR Upayakan Titik Temu RUU Perlindungan Data
Tanggal : Rabu, 25 Mei 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

DPR Upayakan Titik Temu RUU Perlindungan Data

PEMERINTAH dan Komisi I DPR RI telah bersepakat untuk duduk bersama menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Itu utamanya untuk mencari titik temu terkait dengan kedudukan lembaga pengawas penggunaan data pribadi.

“Nah, dalam komunikasi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo, kita sepakat untuk mencari titik temu terhadap masalah badan atau lembaga penagawas perlindungan data pribadi ini,” ujar Ketua Panja RUU PDP Abdul Kharis Almasyhari di sela rapat pembahasan dengan pemerintah di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebut sudah hampir separuh daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PDP sudah diselesaikan. Sisanya, banyak berkaitan dengan badan pengawas atau otoritas perlindungan data pribadi.

“Titik temunya belum ada, tetapi ada semangat segera menyelesaikan ini dan mudah-mudahan *ketemu*nya tidak di ujung yang berbeda. Karena itu jalan keluar agar UU ini bisa segera selesai,” kata Abdul.

Jika tercapai kesepakatan antara DPR dan pemerintah

terkait dengan kedudukan badan pengawas, menurut Abdul, langkah selanjutnya ialah memerinci sanksi pelanggaran data pribadi. Ada dua macam sanksi yang akan dibahas, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

Abdul berharap seluruh pasal RUU PDP selesai dibahas dan disepakati pada masa sidang ini. Dengan begitu, bakal beleid yang sudah diperpanjang berulang kali itu bisa segera disahkan.

“Saat ini, masyarakat bisa melihat kebocoran data di mana-mana dan itu merugikan mereka. Kami punya keinginan yang kuat untuk segera menyelesaikan undang-undang ini dalam masa sidang ini,” tandasnya.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) kembali mendorong DPR dan pemerintah untuk mengakselerasi pengesahan UU PDP. Salah satu tujuannya agar memiliki legislasi yang setara di kelompok G-20.

“Indonesia salah satu dari tiga negara yang belum memiliki legislasi PDP yang komprehensif,” kata Direktur Elsam Wahyudi Djafar.

Padahal, dalam Presidensi Indonesia di G-20, pemerintah tengah mematangkan usulan pengaturan arus data lintas negara. (Ren/Ant/P-2)